



Kebebasan Yang Dikurasi: Peran Platform Digital Dalam Membatasi Ekspresi Publik

Muhammad Nadhif Judhananto ¹⁾; Fero Natanael ²⁾; Thomas Tokan Pureklolon ³⁾

^{1),2),3)} Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan

Email: ¹⁾ 01689240030@student.uph.edu

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember 2025]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [24 Juni 2026]

KEYWORDS

Freedom Of Expression, Digital Public Sphere, Algorithm, Social Media, Digital Democracy, Platform Curation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kajian ini menganalisis paradoks kebebasan berekspresi di ruang publik digital, khususnya pada platform media sosial seperti X, Instagram, YouTube, dan TikTok. Media sosial kerap dipandang sebagai ruang demokratis yang memungkinkan setiap individu menyuarakan opini, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam percakapan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak sepenuhnya bersifat terbuka, melainkan dikonstruksi melalui algoritma, kebijakan moderasi konten, dan logika ekonomi-politik kapitalisme digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana mekanisme teknologis dan institusional di balik media sosial membentuk batas-batas kebebasan berekspresi serta implikasinya terhadap pembentukan wacana publik. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research) dan analisis konseptual. Kajian teoritis didasarkan pada pemikiran Habermas mengenai public sphere, konsep relasi kekuasaan Foucault, serta teori algorithmic governance dan platform society. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menelusuri relasi antara struktur digital, kekuasaan, dan produksi pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma dan kebijakan platform berfungsi sebagai instrumen kurasi sekaligus kontrol yang menentukan visibilitas, distribusi, dan legitimasi suatu konten. Akibatnya, ruang publik digital tidak sepenuhnya bebas, melainkan menjadi arena yang direkayasa oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan platform. Kondisi ini turut melahirkan praktik self-censorship pada pengguna dan membatasi ragam wacana yang dapat muncul di ruang publik. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi pada era digital bersifat "dikurasi" sehingga menuntut kesadaran kritis terhadap mekanisme yang mengatur produksi dan konsumsi informasi.

ABSTRACT

This study analyzes the paradox of freedom of expression in digital public spaces, particularly on social media platforms such as X, Instagram, YouTube, and TikTok. Social media is often perceived as a democratic space that enables individuals to voice opinions, share information, and participate in public discourse. However, this form of freedom is not entirely open; instead, it is constructed through algorithms, content moderation policies, and the economic-political logic of digital capitalism. The purpose of this research is to reveal how technological and institutional mechanisms within social media shape the boundaries of freedom of expression and their implications for the formation of public discourse. This research employs a qualitative approach using library study and conceptual analysis methods. The theoretical framework is based on Habermas' concept of the public sphere, Foucault's notion of power relations, and the theories of algorithmic governance and platform society. Data were analyzed descriptively and critically to examine the relationship between digital structures, power, and knowledge production. The findings indicate that algorithms and platform policies function as instruments of curation and control that determine content visibility, distribution, and legitimacy. Consequently, the digital public sphere is not entirely free but becomes an engineered arena shaped by economic interests and platform power. This condition also generates self-censorship practices among users and limits the diversity of discourses that emerge in digital public spaces. The study concludes that freedom of expression in the digital era is essentially "curated," requiring critical awareness of the mechanisms that regulate the production and consumption of information.

PENDAHULUAN

Ruang publik digital pada awalnya dipandang sebagai wujud baru dari demokrasi komunikasi, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat tanpa batasan ruang dan waktu. Media sosial seperti X (Twitter), Instagram, YouTube, dan TikTok menyediakan arena partisipasi publik yang luas, memungkinkan warga berdiskusi, berdebat, serta mengekspresikan aspirasi secara terbuka. Konsep ini sejalan dengan gagasan public sphere yang dikemukakan (Habermas, 1991) yang memandang ruang publik sebagai tempat berkembangnya rasionalitas dan wacana kritis melalui partisipasi masyarakat. Dalam konteks digital, media sosial berfungsi sebagai *networked public sphere* (Cropf, 2008), sehingga memberikan peluang lebih besar bagi setiap individu untuk membangun opini publik melalui interaksi daring.

Namun, kebebasan berekspresi di ruang digital tidak sepenuhnya bebas. Interaksi publik di platform digital dibentuk dan dibatasi oleh logika algoritma, kebijakan moderasi konten, serta kepentingan ekonomi-politik perusahaan teknologi (Gillespie, 2018). Platform kini bertindak sebagai gatekeeper yang menentukan bentuk, jangkauan, dan keberlanjutan suatu ekspresi publik. Konten yang melanggar standar komunitas dapat dibatasi atau dihapus, sementara konten yang sesuai dengan logika algoritmik justru diperluas penyebarannya (Lufkin, 2020). Hal ini menimbulkan paradoks: media sosial membuka ruang ekspresi publik, tetapi mekanisme algoritmik sekaligus menciptakan bentuk baru pengawasan dan pembatasan (Couldry & Mejias, 2020; Tufekci, 2015).

Ketidaktantransparanan kebijakan platform pada akhirnya membentuk hierarki baru dalam ruang publik digital, di mana algoritma berfungsi sebagai aktor yang menentukan wacana mana yang muncul dan mana yang tersisih. Fenomena ini berkaitan dengan konsep *algorithmic governance*, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan di ruang digital dijalankan melalui logika data, kode, dan sistem otomatis (Beer, 2019). Dengan demikian, kebebasan berekspresi di era digital bukanlah kebebasan alami, melainkan kebebasan yang dikurasi dan dikendalikan oleh teknologi.

Selain itu, kebebasan berekspresi tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi-politik kapitalisme digital. (Fuchs, 2021) menegaskan bahwa aktivitas pengguna, termasuk ekspresi dan interaksi mereka, dieksploitasi sebagai komoditas untuk kepentingan komersial. Dalam kerangka ini, ruang publik digital tidak sepenuhnya otonom, melainkan terintegrasi dalam sistem ekonomi yang menempatkan data dan perhatian sebagai sumber daya utama. Akibatnya, ekspresi publik menjadi rentan terhadap intervensi korporasi yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan kepentingan publik.

Dari sisi pengalaman pengguna, algoritma juga bertindak sebagai instrumen ideologis yang membentuk cara individu memandang realitas sosial. (Pariser, 2011) menggambarkan fenomena ini sebagai *filter bubble*, ketika algoritma menyaring informasi sesuai preferensi pengguna sehingga menciptakan ruang komunikasi yang terfragmentasi dan membatasi pandangan terhadap isu publik. Kondisi ini bertentangan dengan ideal ruang publik Habermas yang menekankan keterbukaan, rasionalitas, dan kesetaraan akses informasi.

Dengan demikian, ruang publik digital merupakan konstruksi kompleks dari interaksi antara teknologi, kebijakan platform, dan relasi kekuasaan. Pemahaman mengenai kebebasan berekspresi di era digital harus melampaui pandangan normatif yang hanya menekankan hak individu untuk berbicara. Sebaliknya, kebebasan tersebut perlu dilihat sebagai proses sosial yang dipengaruhi oleh desain platform, algoritma, dan struktur ekonomi-politik digital.

Kajian ini berupaya menyoroti bagaimana platform digital membentuk batas dan arah ekspresi publik melalui mekanisme kurasi algoritmik. Analisis ini penting untuk memahami perubahan karakter ruang publik di era digital, sekaligus mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai demokrasi dapat bertahan dalam ekosistem komunikasi yang dikendalikan oleh logika platform. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus kritis tentang kebebasan berekspresi, etika digital, dan demokrasi dalam masyarakat informasi.

LANDASAN TEORI

Konsep kebebasan berekspresi dalam ruang publik digital dapat dipahami melalui kerangka pemikiran Jürgen Habermas mengenai *public sphere* atau ruang publik. (Habermas, 1991) memandang ruang publik sebagai arena diskursif yang memungkinkan warga negara terlibat dalam pertukaran opini secara rasional dan kritis mengenai isu-isu kepentingan bersama. Dalam konteks modern, media massa berperan sebagai medium yang memungkinkan terbentuknya ruang publik tersebut. Namun, kemunculan media digital menggeser peran media konvensional menuju platform daring yang bersifat interaktif, partisipatif, dan lebih mendukung pertukaran gagasan secara dua arah.

Ruang publik digital menawarkan peluang baru bagi individu dalam berpartisipasi pada pembentukan wacana publik. Meski demikian, sebagaimana disampaikan (Van Dijck dkk., 2018) melalui konsep *platform society*, interaksi digital dimediasi oleh logika platform yang dipengaruhi kepentingan ekonomi, teknologi, dan kebijakan korporasi. Platform seperti Facebook, Instagram, atau X tidak sekadar menyediakan ruang komunikasi, tetapi juga mengatur, mengarahkan, serta memfilter aliran informasi berdasarkan algoritma yang mereka rancang. Dengan demikian, demokrasi digital tidak berlangsung di ruang netral, melainkan dalam struktur ekonomi-politik yang dikendalikan oleh korporasi teknologi.

Keterkaitan antara teknologi dan praktik pengendalian semakin jelas melalui teori *algorithmic governance*. (Beer, 2019) menjelaskan bahwa algoritma merupakan bentuk baru kekuasaan yang bekerja secara subtil dan tidak terlihat untuk mengatur perilaku pengguna. Algoritma tidak hanya menentukan konten mana yang muncul di linimasa, tetapi juga membentuk cara berpikir, bereaksi, dan berinteraksi di ruang publik digital. Dengan kata lain, algoritma bertindak sebagai instrumen kurasi yang menentukan apa yang dianggap layak untuk dilihat, didengar, dan didiskusikan.



Selanjutnya, teori *power relations* dari (Foucault, 1980) relevan untuk memahami dinamika kekuasaan dalam media digital. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif karena mampu membentuk pengetahuan, perilaku, dan kesadaran individu. Dalam konteks ruang publik digital, kekuasaan platform bekerja melalui mekanisme normalisasi, seperti mendorong jenis konten tertentu agar menjadi viral atau membatasi topik yang dianggap sensitif. Dengan demikian, ruang publik digital menjadi arena di mana kebebasan berekspresi dikonstruksi ulang dalam relasi kekuasaan yang kompleks antara pengguna, algoritma, kebijakan platform, dan kepentingan ekonomi-politik perusahaan teknologi.

Tujuan penelitian dalam artikel ini difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai konstruksi kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Pertama, penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme kurasi dan kontrol yang dilakukan oleh platform digital terhadap ekspresi publik, termasuk bagaimana algoritma dan kebijakan moderasi konten bekerja menentukan visibilitas dan penyebaran suatu informasi. Kedua, penelitian ini menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan platform dan sistem algoritmik terhadap kebebasan berekspresi serta kualitas ruang publik digital, khususnya terkait terbatasnya akses terhadap wacana yang beragam dan potensi terjadinya bias informasi. Ketiga, penelitian ini berupaya menggambarkan relasi kekuasaan yang terbentuk antara pengguna, korporasi teknologi, dan sistem algoritmik, serta bagaimana hubungan tersebut mempengaruhi pola komunikasi publik di era digital. Melalui tiga fokus utama ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika demokrasi digital yang terus berkembang dalam ekosistem media berbasis platform.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka serta analisis konseptual-kritis. Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan utama kajian adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika kebebasan berekspresi di ruang publik digital melalui landasan teoretis, bukan melalui pengukuran angka atau data kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menelusuri pemikiran Habermas tentang ruang publik, konsep relasi kekuasaan dari Foucault, serta kajian (Beer, 2019; Van Dijck dkk., 2018) mengenai tata kelola algoritmik dan masyarakat berbasis platform.

Sumber data yang digunakan terdiri dari literatur primer dan sekunder yang relevan, termasuk buku-buku teori komunikasi, artikel jurnal ilmiah, serta penelitian yang membahas ruang publik digital, regulasi platform, dan peran algoritma dalam mengendalikan aliran informasi. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji secara kritis berbagai sumber yang berhubungan dengan isu kebebasan berekspresi dan kekuasaan dalam konteks digital.

Proses analisis dilakukan menggunakan pendekatan konseptual-hermeneutik, yaitu dengan menafsirkan keterkaitan antara teori, praktik media digital, dan struktur kekuasaan yang dijalankan melalui algoritma. Analisis berlangsung secara interpretatif dan reflektif, dilakukan berulang kali antara kerangka teori dan fenomena empiris untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana platform digital membentuk pola komunikasi publik.

Untuk menjaga validitas konseptual, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan beberapa literatur, sehingga interpretasi tetap terjaga objektivitas dan kelengkapannya. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi di ruang publik digital dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dikendalikan oleh algoritma serta kepentingan korporasi teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Platform Digital sebagai Ruang Publik yang Dikendalikan

Ruang publik digital pada awalnya dipahami sebagai arena demokratis yang memberi kesempatan luas bagi warga negara untuk terlibat dalam partisipasi publik tanpa batas. Namun, dalam praktiknya ruang ini dibentuk oleh kepentingan ekonomi-politik perusahaan platform (Fuchs, 2021). Algoritma media sosial menciptakan hierarki visibilitas yang menentukan konten mana yang ditonjolkan dan mana yang diabaikan, sehingga kebebasan berekspresi tidak lagi bersifat alami, tetapi dikurasi melalui mekanisme teknis yang tidak sepenuhnya transparan (Beer, 2019; Napoli, 2021). Dalam perspektif (Habermas, 1991) kondisi ini melahirkan paradoks: ruang publik digital menyediakan peluang partisipasi, namun pada saat yang sama dibatasi oleh logika platform dan algoritma.

Moderasi Konten: Antara Etika dan Dominasi

Secara normatif, moderasi konten bertujuan mencegah penyebaran ujaran kebencian serta disinformasi. Namun, moderasi juga berfungsi sebagai alat kontrol yang menentukan norma komunikasi di ruang digital (Gillespie, 2018). Kebijakan penghapusan konten sensitif, baik yang bersifat politik maupun sosial-budaya, dapat membatasi ekspresi warga tanpa kejelasan mekanisme atau transparansi informasi. Dalam perspektif (Foucault, 1980) moderasi merupakan bentuk kekuasaan produktif yang menormalisasi perilaku dan membentuk batas ekspresi. Akibatnya, kebebasan berekspresi menjadi bentuk “kebebasan yang diawasi,” tunduk pada parameter algoritmik dan kebijakan platform.

Algoritma dan Fenomena Filter Bubble

Algoritma berperan sebagai perangkat utama dalam mengatur arus informasi melalui sistem rekomendasi, pemeringkatan, dan personalisasi konten. Fenomena *filter bubble* (Pariser, 2011) menunjukkan bahwa pengguna cenderung hanya terpapar informasi yang sejalan dengan preferensi mereka, sehingga mempersempit ruang diskursus kritis dan menghambat rasionalitas publik (Habermas, 1989). Selain itu, algoritma cenderung memperkuat konten yang berpotensi viral dan emosional, yang menguntungkan secara komersial (Tufekci, 2015; Van Dijck dkk., 2018). Dengan cara ini, kebebasan berekspresi dikomodifikasi dan diukur berdasarkan logika ekonomi.

Ekonomi Politik Platform dan Komodifikasi Ekspresi

Aktivitas pengguna, mulai dari membuat unggahan hingga melakukan interaksi, menghasilkan data yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal ini menyebabkan ekspresi publik bertransformasi menjadi instrumen produksi nilai komersial (Couldry & Mejias, 2020; Fuchs, 2021). Prioritas algoritma terhadap konten viral dan sensasional menjadikan isu-isu yang kompleks cenderung tenggelam, sehingga fungsi deliberatif ruang publik sebagaimana dibayangkan Habermas tergeser oleh logika kapitalisme atensi. Dengan demikian, partisipasi digital berlangsung dalam relasi yang bersifat eksploitatif antara pengguna dan platform.

Dinamika Kekuasaan antara Platform, Pengguna, dan Negara

Kebebasan berekspresi di ruang digital turut dipengaruhi oleh regulasi negara yang mendorong platform menyesuaikan atau membatasi konten tertentu. Hal ini menciptakan bentuk kontrol ganda: kontrol vertikal melalui kebijakan negara dan kontrol horizontal melalui algoritma platform (Suzor, 2019). Pendekatan (Foucault, 1980) menjelaskan kondisi ini sebagai *disciplinary power*, di mana pengguna tidak secara langsung dipaksa untuk diam, tetapi diarahkan untuk berbicara dalam batas-batas tertentu, bahkan secara sukarela menyesuaikan ekspresi melalui mekanisme *self-regulation*.

Implikasi terhadap Demokrasi Digital

Paradoks kebebasan digital memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas demokrasi komunikasi. Wacana publik kehilangan karakter deliberatif ketika algoritma mengoptimalkan visibilitas berdasarkan interaksi dan potensi keuntungan, bukan berdasarkan kompleksitas argumen atau kepentingan publik (Zuboff, 2019). Hierarki algoritmik menggantikan prinsip kesetaraan, meskipun masih terdapat ruang untuk perlawanan simbolik. Gerakan digital seperti #BlackLivesMatter merupakan contoh bagaimana logika *networked visibility* dapat digunakan untuk menekan kekuasaan institusional (Tufekci, 2015). Namun, daya tahan gerakan-gerakan tersebut tetap bergantung pada struktur algoritmik platform yang mereka manfaatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang publik digital memiliki sifat yang paradoksal. Media sosial yang semula dipahami sebagai wadah demokratis ternyata tidak sepenuhnya memberikan kebebasan ekspresi sebagaimana diasumsikan dalam konsep ruang publik Habermas. Kebebasan tersebut dikonstruksi dan dikendalikan oleh mekanisme teknologi, kebijakan platform, dan logika ekonomi-politik kapitalisme digital. Akibatnya, ruang publik digital lebih banyak dibentuk oleh kepentingan algoritma dan korporasi dibandingkan menjadi arena deliberatif yang otonom.

Pertama, media sosial dan algoritma telah mengubah konsep public sphere menjadi ruang yang terhubung (*networked*), tetapi juga terkurasi. Nilai keterbukaan, kesetaraan, dan rasionalitas diskursus tergeser oleh logika optimasi perhatian yang berfokus pada interaksi dan keuntungan. Kedua, algoritma dan moderasi konten berperan sebagai instrumen kekuasaan yang menentukan batas ekspresi,



mengatur visibilitas wacana, dan menjadikan platform sebagai *gatekeeper* baru dalam arus informasi publik.

Ketiga, aktivitas pengguna merupakan bentuk kerja digital yang menghasilkan data bernilai ekonomi. Ekspresi personal dikomodifikasi dan dimanfaatkan dalam sistem ekonomi digital, menjadikan kebebasan berekspresi bagian dari produksi nilai platform. Keempat, kebebasan berekspresi merupakan hasil negosiasi antara pengguna, platform, dan negara, di mana pengguna berada dalam posisi rentan terhadap kontrol algoritmik sekaligus regulasi pemerintah.

Kelima, meskipun kekuasaan platform dominan, masih terdapat peluang resistensi melalui literasi digital, kesadaran kritis, dan transparansi algoritma. Oleh karena itu, menjaga kebebasan berekspresi di era digital memerlukan regulasi yang berpihak pada kepentingan publik serta mekanisme pengawasan yang adil. Secara keseluruhan, kebebasan berekspresi di era digital adalah kebebasan yang dikurasi, terus dinegosiasikan dalam relasi kekuasaan antara teknologi, ekonomi, dan masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil kajian, peneliti menyarankan perlunya upaya multidisipliner untuk menjaga kualitas kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Pertama, platform digital harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan algoritma dan mekanisme moderasi konten agar publik dapat memahami bagaimana visibilitas wacana dibentuk dan dibatasi. Kedua, pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada keamanan dan kepatuhan hukum, tetapi juga secara aktif melindungi hak berekspresi, termasuk pembatasan intervensi yang berlebihan terhadap dinamika komunikasi publik di media sosial. Ketiga, masyarakat perlu diperkuat melalui literasi digital yang kritis, terutama terkait pemahaman mengenai data, algoritma, dan praktik komersialisasi ekspresi di ruang digital. Keempat, kolaborasi antara akademisi, pembuat kebijakan, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi menjadi penting untuk memastikan ruang publik digital tetap inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, kebebasan berekspresi di era digital dapat berkembang secara lebih etis, akuntabel, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beer, D. (2019). The social power of algorithms. Dalam *The social power of algorithms* (hlm. 1–13). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781351200677-1/social-power-algorithms-david-beer>
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2020). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9781503609754>
- Cropf, R. A. (2008). Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven and London: Yale University Press. 528 pp. \$40.00 (papercloth). *Social Science Computer Review*, 26(2), 259–261. <https://doi.org/10.1177/1084713807301373>
- Foucault, M. (1980). *Language, Counter-memory, Practice: Selected Essays and Interviews*. Cornell University Press.
- Fuchs, C. (2021). *Social media: A critical introduction*. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5018557&publisher=FZ7200>
- Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media*. Yale University Press. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cOJgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gillespie,+T.+\(2018\).+Custodians+of+the+Internet:+Platforms,+content+moderation,+and+the+hidden+decisions+that+shape+social+media.+New+Haven,+CT:+Yale+University+Press.&ots=PiRIIVSSj0&sig=CDbwPYCCotjiy6e3F5Bxeb5kEjE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=cOJgDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Gillespie,+T.+(2018).+Custodians+of+the+Internet:+Platforms,+content+moderation,+and+the+hidden+decisions+that+shape+social+media.+New+Haven,+CT:+Yale+University+Press.&ots=PiRIIVSSj0&sig=CDbwPYCCotjiy6e3F5Bxeb5kEjE)
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=e799caakIWOC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Habermas,+J.+\(1989\).+The+structural+transformation+of+the+public+sphere:+An+inquiry+into+a+category+of+bourgeois+society+\(T.+Burger+%26+F.+Lawrence,+Trans.%3B+Original+work+published+1962\).+Cambridge,+MA:+MIT+Press.&ots=5SIFYS2CZ&sig=XTd4X7o58Z_2iG5DG4jWFRiX88s](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=e799caakIWOC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Habermas,+J.+(1989).+The+structural+transformation+of+the+public+sphere:+An+inquiry+into+a+category+of+bourgeois+society+(T.+Burger+%26+F.+Lawrence,+Trans.%3B+Original+work+published+1962).+Cambridge,+MA:+MIT+Press.&ots=5SIFYS2CZ&sig=XTd4X7o58Z_2iG5DG4jWFRiX88s)
- Lufkin, P. (2020). *Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age*. JSTOR.
- Napoli, P. M. (2021). Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age. *International Journal of Communication*.

- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the Internet is hiding from you*. penguin UK.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-FWO0puw3nYC&oi=fnd&pg=PT24&dq=Pariser,+E.+\(2011\).+The+filter+bubble:+What+the+Internet+is+hiding+from+you.+New+York,+NY:+Penguin+Press&ots=g6MqlqvPQW&sig=tb1RDHm08fqqMA390YkzTpFJSvQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-FWO0puw3nYC&oi=fnd&pg=PT24&dq=Pariser,+E.+(2011).+The+filter+bubble:+What+the+Internet+is+hiding+from+you.+New+York,+NY:+Penguin+Press&ots=g6MqlqvPQW&sig=tb1RDHm08fqqMA390YkzTpFJSvQ)
- Tufekci, Z. (2015). Algorithmic harms beyond Facebook and Google: Emergent challenges of computational agency. *Colo. Tech. LJ*, 13, 203.
- Van Dijck, J., Poell, T., & De Waal, M. (2018). *The platform society: Public values in a connective world*. Oxford university press.
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wLhwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=van+Dijck,+J.,+Poell,+T.,+%26+de+Waal,+M.+\(2018\).+The+platform+society:+Public+values+in+a+connective+world.+Oxford,+UK:+Oxford+University+Press.&ots=VLKD6E3uyy&sig=3j7T8Mm4yLOE8GYQpQiT_Pd3-jE](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=wLhwDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=van+Dijck,+J.,+Poell,+T.,+%26+de+Waal,+M.+(2018).+The+platform+society:+Public+values+in+a+connective+world.+Oxford,+UK:+Oxford+University+Press.&ots=VLKD6E3uyy&sig=3j7T8Mm4yLOE8GYQpQiT_Pd3-jE)
- Zuboff, S. (2019). Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action. *New Labor Forum*, 28(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/1095796018819461>